

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan bagian penting dalam suatu organisasi sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seluruh tingkatan organisasi sehingga dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya pengendalian internal diharapkan organisasi dapat menangani serta mengelola risiko bisnis serta mencegah *fraud* yang mungkin terjadi dan dapat mengancam pencapaian tujuan organisasi.

2.1.1 Pengertian Pengendalian Internal

Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO) (2013) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut :

“Internal control is a process, effected by an entiry’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations reporting, and compliance.”

Dari pengertian pengendalian internal menurut COSO tersebut dapat dipahami bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bagi pencapaian tujuan organisasi yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.

Menurut Tuanakotta (2013) pengendalian internal adalah sebagai berikut :

“Pengendalian internal adalah proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh TCWG (Those Charged With Governance atau fungsi pengawasan pada tatanan atas), manajemen dan karyawan lain untuk menangani risiko bisnis dan kecurangan yang diketahui (identified business and fraud risk) mengancam pencapaian tujuan entitas seperti

pelaporan keuangan yang andal. Untuk itu pengendalian internal dimaksudkan untuk memberikan jawaban (*response*) untuk menangkal (*mitigate*) suatu ancaman (kemungkinan terjadinya risiko), sehingga manajemen menerapkan pengendalian agar seluruh ancaman terkait dengan pengelolaan harta organisasi dapat dideteksi secara dini.”

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008

Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa:

“Pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Ada dua konsep utama yang melandasi penyusunan dan implementasi pengendalian internal, yaitu kepastian yang layak dan keterbatasan bawaan (*inheren*) (Hery, 2011).

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang dirancang, diimplementasi, dan dipengaruhi oleh seluruh tingkatan organisasi, yaitu dewan direksi, manajemen dan personel organisasi lainnya untuk menangani risiko bisnis dan kecurangan yang akan mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga memberikan keyakinan memadai atas keandalan dari pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi organisasi, serta kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal memberikan keyakinan yang memadai dan kepastian yang layak, namun tidak absolut. Pengembangan pengendalian internal harus mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan ditimbulkan dari penerapan pengendalian tersebut.

2.1.2 Tujuan Pengendalian Internal

COSO (2013) dalam *framework* terbarunya menyatakan mengenai tujuan-tujuan pengendalian internal sebagai berikut :

“The framework provides for three categories of objectives, which allow organizations to focus on differing aspects of internal control :

1. *Operations Objectives – These pertain to effectiveness and efficiency of the entity’s operations, including operational and financial performance goals, and safeguarding assets against loss.*
2. *Reporting Objectives – These pertain to internal and external financial and non-financial reporting and may encompass reliability, timeliness, transparency, or other terms as set forth by regulators recognized standard setters, or the entity’s policies.*
3. *Compliance Objectives – These pertain to adherence to laws and regulations to which the entity is subject.”*

Menurut Hery (2011) tujuan pengendalian internal yaitu keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta ketaatan pada hukum dan peraturan.

Sedangkan menurut Tuanakotta (2013) tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut :

“Tujuan pengendalian internal secara garis besar dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

1. *Strategis, sasaran-sasaran utama (high-level goals) yang mendukung misi entitas,*
2. *Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan),*
3. *Operasi (pengendalian operasional atau operational controls),*
4. *Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.”*

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas tujuan pengendalian internal adalah :

1. *Tujuan Operasi – Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi organisasi, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan*

serta menjaga aset dari kerugian, tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan;

2. Tujuan Pelaporan – Berkaitan dengan pelaporan keuangan maupun non keuangan baik internal maupun eksternal yang meliputi keandalan, ketepatan waktu, transparansi, atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh pembuat peraturan, standar maupun kebijakan organisasi;
3. Tujuan Kepatuhan – Berkaitan dengan kepatuhan dari setiap tingkatan organisasi terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dalam organisasi.

2.1.3 Komponen Pengendalian Internal

COSO (2013) menyatakan mengenai komponen pengendalian internal sebagai berikut :

“Internal control consists of five integrated components :

- 1. Control Environment,*
- 2. Risk Assessment,*
- 3. Control Activities,*
- 4. Information and Communication,*
- 5. Monitoring Activities.”*

Adapun hubungan di antara tujuan dan komponen-komponen pengendalian internal tersebut digambarkan oleh COSO (2013) dalam bentuk kubus sebagai berikut :

Gambar 2.1**COSO Cube**

Sumber: COSO (2013)

Berdasarkan gambar tersebut menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara tujuan-tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi yaitu operasi, pelaporan, dan kepatuhan dengan komponen-komponen pengendalian internal sebagai sesuatu yang harus dipenuhi dan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Komponen tersebut diimplementasikan pada setiap tingkatan organisasi baik divisi, unit operasi, dan fungsi lainnya.

Komponen-komponen pengendalian internal saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, pengendalian internal bukanlah suatu proses yang berurutan, tetapi merupakan suatu interaksi antar tujuan-tujuan dimana komponen-komponen pengendalian internal ini akan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

2.1.3.1 Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

COSO (2013) menjelaskan mengenai lingkungan pengendalian (*control environment*) adalah sebagai berikut :

“The control environment is the set of standards, processes, and structures that provide the basis for carrying out internal control across the organization. The board of directors and senior management establish the tone at the top regarding the importance of internal control including expected standards of conduct. Management reinforces expectations at the various levels of the organization. The control environment comprises the integrity and ethical values of the organization; the parameters enabling the board of directors to carry out its governance oversight responsibilities; the organizational structure and assignment of authority and responsibility; the process for attracting, developing, and retaining competent individuals; and the rigor around performance measures, incentives, and rewards to drive pervasive impact on the overall system of internal control. There are five components of internal control principles in the control environment :

- 1. The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical values,*
- 2. The board of directors demonstrates independence from management and exercises oversight of the development and performance of internal control,*
- 3. Management establishes, with board oversight, structures, reporting lines, and appropriate authorities and responsibilities in the pursuit of objectives,*
- 4. The organization demonstrates a commitment to attract, develop, and retain competent individuals in alignment with objectives,*
- 5. The organization holds individuals accountable for their internal control responsibilities in the pursuit of objectives.”*

Berdasarkan pernyataan COSO (2013) tersebut menjelaskan bahwa lingkungan pengendalian merupakan seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal diseluruh organisasi. Dewan direksi dan manajemen senior selaras dengan pernyataan sebelumnya mengenai pentingnya pengendalian internal termasuk standar yang diharapkan dalam menjalankan organisasi. Manajemen memperkuat harapannya

di berbagai tingkatan organisasi. Lingkungan pengendalian terdiri atas integritas dan nilai etika dalam organisasi; parameter yang memungkinkan dewan direksi melaksanakan tanggung jawab pengawasan tata kelola; struktur organisasi serta tugas atas wewenang dan tanggung jawab; proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten; dan ketelitian ukuran kinerja, insentif atau dorongan, dan penghargaan untuk mendorong pengaruhnya dalam sistem pengendalian internal secara keseluruhan. Terdapat lima komponen prinsip pengendalian internal dalam lingkungan pengendalian, yaitu :

1. Organisasi menunjukkan komitmen dalam integritas dan nilai-nilai etika,
2. Dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan dan kinerja pengendalian internal,
3. Manajemen membentuk, dengan pengawasan dewan, struktur, garis pelaporan, dan pihak yang berwenang serta bertanggung jawab dalam mengejar tujuan,
4. Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten sejalan dengan tujuan,
5. Organisasi mempertahankan individu yang akuntabel untuk tanggung jawabnya atas pengendalian internal dalam mengejar tujuan.

2.1.3.2 Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

COSO (2013) menjelaskan mengenai penilaian risiko (*risk assessment*) sebagai berikut :

“Risk is defined as the possibility that an event will occur and adversely affect the achievement of objectives. Risk assessment involves a dynamic and iterative process for identifying and assessing risk to achievement of objectives. Risk to the achievement of these objectives form across the entity are considered relative to established risk tolerances. Thus, risk assessment forms the basis for determining how risks will be managed. A precondition to risk assessment is the establishment of objectives, linked at different levels of entity. Management specifies objectives within categories relating to operations, reporting, and compliance with sufficient clarity to be able to identify and analyze risks to those objectives. Management also considers the suitability of the objectives for the entity. Risk assessment also requires management to consider the impact of possible changes in the external environment and within its own business model that may render internal control ineffective. There are four components of internal control principles in the risk assessment :

- 1. The organization specifies objectives with sufficient clarity to enable the identification and assessment of risks relating to objectives,*
- 2. The organization identifies risks to the achievement of its objectives across the entity and analyzes risks as a basis for determining how the risks should be managed,*
- 3. The organization considers the potential for fraud in assessing risks to the achievement of objectives,*
- 4. The organization identifies and assesses changes that could significantly impact the system of internal control.”*

Berdasarkan pernyataan COSO (2013) tersebut menjelaskan bahwa risiko merupakan kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan dapat berpengaruh negatif dalam pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko meliputi proses yang dinamis dan berulang dalam mengidentifikasi dan menilai risiko untuk pencapaian tujuan. Risiko terhadap pencapaian tujuan tersebut pada seluruh entitas dipertimbangkan secara relatif untuk menetapkan toleransi risiko. Dengan demikian, penilaian risiko membentuk dasar bagi penentuan bagaimana risiko

akan dikelola. Prasyarat penilaian risiko adalah pembentukan tujuan, dihubungkan pada tingkatan yang berbeda dalam entitas. Manajemen menentukan tujuan dalam kategori yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan dengan kejelasan yang memadai untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk tujuan tersebut. Manajemen juga mempertimbangkan kesesuaian tujuan dari entitas. Penilaian risiko juga mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan dampak atas kemungkinan perubahan dalam lingkungan eksternal dan dalam model bisnisnya sendiri yang mungkin membuat pengendalian internal tidak efektif. Terdapat empat komponen prinsip pengendalian internal dalam penilaian risiko, yaitu :

1. Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang memadai dalam memungkinkan mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan tujuan,
2. Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan menganalisis risiko sebagai dasar dalam menentukan bagaimana risiko seharusnya dikelola,
3. Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan,
4. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan signifikan yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.

2.1.3.3 Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

COSO (2013) menjelaskan mengenai aktivitas pengendalian (*control activities*) sebagai berikut :

“Control activities are the actions established through policies and procedures that help ensure that management’s directives to mitigate risks to the achievement of objectives are carried out. Control activities are performed at all levels of the entity, at various stages within business processes, and over the technology environment. They may be preventive or detective in nature and may encompass a range of manual and automated activities such as authorizations and approvals, verifications, reconciliations, and business performance reviews. Segregation of duties is typically built into the selection and development of control activities. Where segregation of duties is not practical, management selects and develops alternative control activities. There are three components of internal control principles in the control activities :

- 1. The organization selects and develops control activities that contribute to the mitigation of risks to the achievement of objectives to acceptable levels,*
- 2. The organization selects and develops general control activities over technology to support the achievement of objectives,*
- 3. The organization deploys control activities through policies that establish what is expected and procedures that put policies into place.”*

Berdasarkan pernyataan COSO (2013) menjelaskan bahwa aktivitas pengendalian adalah tindakan yang dibentuk melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arah manajemen dalam mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada seluruh tingkatan entitas, berbagai tahapan dalam proses bisnis, dan lingkungan teknologi. Aktivitas pengendalian memungkinkan pencegahan dan pendeteksian serta memungkinkan mencakup berbagai aktivitas manual dan otomatis seperti otorisasi dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan ulasan kinerja bisnis. Pemisahan tugas biasanya dibangun menjadi pemilihan atau pengembangan aktivitas pengendalian. Di mana pemisahan tugas tidak berguna, manajemen memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian alternatif. Terdapat tiga komponen prinsip pengendalian internal dalam aktivitas pengendalian, yaitu :

1. Organisasi memilih dan mengembangkan pengendalian internal yang berkontribusi dalam mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan ke tingkat yang dapat diterima,
2. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan,
3. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur yang menempatkan kebijakan ke tempatnya.

2.1.3.4 Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

COSO (2013) menjelaskan mengenai komponen informasi dan komunikasi (*information and communication*) dalam pengendalian internal sebagai berikut :

“Information is necessary for the entity to carry out internal control responsibilities to support the achievement of its objectives. Management obtains or generates and uses relevant and quality information from both internal and external sources to support the functioning of other components of internal control. Communication is the continual, iterative process of providing, sharing, and obtaining necessary information. Internal communication is the means by which information is disseminated throughout the organization, flowing up, down, and across the entity. It enables personnel to receive a clear message from senior management that control responsibilities must be taken seriously. External communication is twofold: it enables inbound communication of relevant external information, and it provides information to external parties in response to requirements and expectations. There are three components of internal control principles in the information and communication :

1. *The organization obtains or generates and uses relevant, quality information to support the functioning of internal control,*
2. *The organization internally communicates information, including objectives and responsibilities for internal control, necessary to support the functioning of internal control,*
3. *The organization communicates with external parties regarding matters affecting the functioning of internal control.”*

Berdasarkan pernyataan COSO (2013) menjelaskan bahwa informasi penting bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal dalam mendukung pencapaian tujuannya. Manajemen memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan relevan dari sumber internal maupun eksternal untuk mendukung fungsi komponen lainnya dalam pengendalian internal. Komunikasi berjalan secara terus-menerus, menyediakan proses yang berulang, berbagi, dan memperoleh informasi yang diperlukan. Komunikasi internal adalah sarana untuk menyebarkan informasi di seluruh organisasi, mengalir ke atas, ke bawah, dan di entitas. Komunikasi memungkinkan personil (pegawai) untuk menerima pesan yang jelas dari manajemen senior bahwa pengendalian tanggung jawab yang harus dianggap serius. Komunikasi eksternal yaitu memungkinkan mendapatkan komunikasi dari informasi eksternal yang relevan dan menyediakan informasi bagi pihak eksternal dalam menanggapi kebutuhan dan harapan. Terdapat tiga komponen prinsip pengendalian internal dalam informasi dan komunikasi, yaitu :

1. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal,
2. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal, yang diperlukan dalam mendukung fungsi pengendalian internal,
3. Organisasi berkomunikasi dengan pihak luar mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

2.1.3.5 Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

COSO (2013) menjelaskan aktivitas pemantauan dalam pengendalian internal adalah sebagai berikut :

“Ongoing evaluations, separate evaluations, or some combination of the two are used to ascertain whether each of the five components of internal control, including controls to effect the principles within each component, is present and functioning. Ongoing evaluations, built into business processes at different levels of entity, provide timely information. Separate evaluations, conducted periodically, will vary in scope and frequency depending on assessment of risks, effectiveness of ongoing evaluations, and other management considerations. Findings are evaluated against criteria established by regulators, recognized standard setting bodies or management and the board of directors, and deficiencies are communicated to management and the board of directors as appropriate. There are two components of internal control principles in the monitoring :

- 1. The organization selects, develops, and performs ongoing and/or separate evaluations to ascertain whether the components of internal control are present and functioning,*
- 2. The organization evaluates and communicates internal control deficiencies in a timely manner to those parties responsible for taking corrective action, including senior management and the board of directors, as appropriate.”*

Berdasarkan pernyataan COSO (2013) menjelaskan bahwa aktivitas pemantauan merupakan evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau beberapa kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal, termasuk pengendalian untuk mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, tersedia dan berfungsi. Evaluasi berkelanjutan, dibangun ke dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda dari entitas, memberikan informasi yang tepat waktu. Evaluasi terpisah, dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektivitas evaluasi yang berkelanjutan, dan pertimbangan

manajemen lainnya. Temuan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh regulator, diakui badan pengaturan standar atau dewan direksi dan manajemen, dan kekurangannya dikomunikasikan kepada dewan direksi dan manajemen secara tepat. Terdapat dua komponen prinsip pengendalian internal dalam pemantauan, yaitu :

1. Organisasi memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau evaluasi terpisah untuk memastikan apakah komponen pengendalian internal tersedia dan berfungsi,
2. Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk dewan direksi dan manajemen senior, yang sesuai.

2.1.4 Keterbatasan Pengendalian Internal

Pengendalian internal memberikan keyakinan yang memadai dan kepastian yang layak, namun tidak absolut. Baiknya suatu pengendalian internal tidak menjamin sepenuhnya bahwa apa yang menjadi tujuan dari organisasi akan tercapai. Hal ini disebabkan karena pengendalian internal memiliki keterbatasan-keterbatasan.

COSO (2013) menjelaskan mengenai keterbatasan-keterbatasan pengendalian internal sebagaimana yang dirumuskan dalam *Internal Control Integrated Framework* sebagai berikut :

“The Framework recognizes that while internal control provides reasonable assurance of achieving the entity’s objectives, limitations do exist. Internal control cannot prevent bad judgement or decisions, or external events that can cause an organization to fail to achieve its

operational goals. In other words, even an effective system of internal control can be experience a failure. Limitations may result from the :

- 1. Suitability of objectives established as precondition to internal control,*
- 2. Reality that human judgement in decision making can be faulty and subject to bias,*
- 3. Breakdowns that can occur because of human failures such as a simple errors,*
- 4. Ability of management to override internal control,*
- 5. Ability of management, other personnel, and/or third parties to circumvent controls through collusion,*
- 6. External events beyond the organization's control.”*

Berdasarkan pernyataan COSO mengenai keterbatasan-keterbatasan pengendalian internal menjelaskan bahwa walaupun pengendalian internal memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan organisasi, keterbatasan memang ada. Pengendalian internal tidak dapat mencegah pertimbangan dan kepastian buruk, atau kejadian eksternal yang dapat menyebabkan organisasi gagal untuk mencapai tujuan operasionalnya. Dengan kata lain, bahkan sistem pengendalian internal yang efektif dapat mengalami kegagalan. Keterbatasan dapat diakibatkan dari :

1. Kesesuaian tujuan yang ditetapkan sebagai prasyarat untuk pengendalian internal,
2. Realita bahwa penilaian manusia dalam pengambilan keputusan dapat merusak dan subjek bias,
3. Kerusakan yang dapat terjadi karena kesalahan manusia seperti kesalahan sederhana,
4. Kemampuan manajemen dalam mengesampingkan pengendalian internal,

5. Kemampuan manajemen, personel (pegawai) lainnya, dan/atau pihak ketiga untuk menggagalkan pengendalian melalui kolusi,
6. Peristiwa eksternal di luar kendali organisasi.

Faktor manusia adalah yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan sistem pengendalian internal. Sebuah sistem pengendalian yang baik akan dapat menjadi tidak efektif oleh karena adanya karyawan yang kelelahan, ceroboh, atau bersikap acuh tak acuh. Demikian juga halnya dengan kolusi, di mana kolusi ini akan dapat secara signifikan mengurangi keefektifan sebuah sistem dan mengeliminasi proteksi yang ditawarkan dari pemisahan tugas. Belum lagi adanya sebuah pandangan umum yang mengatakan bahwa pada prinsipnya di dunia ini tidak ada sesuatu yang begitu sempurna, termasuk sistem pengendalian internal yang dijalankan perusahaan. Terakhir, ukuran perusahaan juga akan dapat memicu keterbatasan pengendalian internal (Hery, 2013).

Membangun pengendalian internal yang kuat bukanlah hal mudah, tetapi belum tentu sulit. Menurut Kumaat (2011) beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebagai kunci keberhasilan (atau sebaliknya) adalah :

1. Komitmen *Business Owner* (BDO) untuk menjadikan pengendalian internal sebagai bagian dari budaya organisasi (tertuang dalam Visi, Misi, *Shared Values* perusahaan) serta terpancar melalui keteladanan sikap yang menjunjung tinggi *Responsibility*, *Accountability*, dan *Transparency (Good Corporate Governance)* serta kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis yang berlaku.

2. Keberanian Perusahaan untuk melengkapi bisnis dengan infrastruktur pengendalian yang mumpuni melalui :
 - Penempatan SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi pada sejumlah 'posisi kunci' yang menunjang pengendalian internal.
 - Penempatan unit kerja Internal Audit dan perangkat pengendalian independen lainnya (seperti *Risk Management* dan *System Development*) pada posisi yang strategis (*decision authority* yang memadai), atau setidaknya *Head of Department* yang bersangkutan sejajar dengan tingkatan *Head of Department* unit-unit kerja di *Execution Level*.
 - Investasi yang cukup dalam pengembangan *computer based information system* untuk memindahkan *risk assessment* dan *monitoring*.
3. Dorongan secara *Top-Down* yang teratur dan konsisten terhadap seluruh jajaran internal yang bertujuan memperkuat *genuine environmental control by self assessment* dengan cara :
 - Mengomunikasikan setiap hal yang perlu diketahui oleh semua level, baik level *Strategic* maupun *Executive (business plan/target, policy, progress and critical issues*, dan sebagainya).
 - Mengoptimalkan birokrasi yang ramping (*lean bureaucracy*), pendelegasian otoritas yang memadai pada seluruh unit kerja, dan koordinasi antar bagian yang solid.

- Membangun tingkat kepatuhan pada kaidah bisnis/prosedur kerja yang mendorong pencapaian aktualisasi maksimum setiap individu melalui sebuah *career development* serta *reward and punishment system* berdasarkan azas keadilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pengendalian sangat ditentukan oleh efektivitas seluruh tingkatan dalam organisasi dan bukan suatu upaya yang harus dimulai dari lini terbawah, sehingga masing-masing jajaran internal organisasi menyadari akan peranan masing-masing jabatan/fungsi/tugas dalam organisasi tersebut. Apabila peranan masing-masing jabatan/fungsi/tugas tersebut telah dilaksanakan dengan memadai diharapkan dapat tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan.

2.2 Pencegahan *Fraud*

Secara umum, dikenal dua tipe kesalahan, yaitu kekeliruan (*errors*) dan ketidakberesan (*irregularities*). *Errors* merupakan kesalahan yang timbul sebagai akibat tindakan yang tidak disengaja yang dilakukan manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan kesalahan teknis perhitungan, pemindahbukuan, dan lain-lain. Sedangkan *irregularities* merupakan kesalahan yang sengaja dilakukan oleh manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan kesalahan material terhadap penyajian laporan keuangan, misalnya kecurangan (*fraud*).

Fraud yang semakin marak terjadi membuat kerugian yang cukup besar bagi organisasi maupun negara. Untuk itu, organisasi memerlukan tindakan pencegahan *fraud*. Pencegahan *fraud* merupakan tindakan yang dilakukan untuk

mencegah pelaksanaan *fraud* dan mempersempit ruang gerak pelaku *fraud*. Organisasi dengan pengendalian internal yang dilaksanakan dengan baik dapat menghalangi tindakan *fraud*.

2.2.1 Pengertian *Fraud*

Menurut Karyono (2013) pengertian *fraud* adalah sebagai berikut :

“*Fraud* dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.”

Sedangkan menurut Albrect *et al.* (2012) menyatakan bahwa *fraud* adalah sebagai berikut :

“*Fraud is generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as general proportion in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery.*”

Pernyataan Albrect *et al.* (2012) di atas menjelaskan bahwa kecurangan adalah istilah umum yang mencakup semua cara dimana individu menggunakan kecerdasannya untuk dapat menciptakan cara bagaimana mendapatkan suatu manfaat dari orang lain. Tidak ada kepastian untuk aturan yang dapat ditetapkan sebagai aturan yang umum dalam mendefinisikan penipuan atau kecurangan, karena mencakup beberapa kejadian, tipu daya, cara-cara licik yang tidak adil yang dilakukan oleh orang lain yang merupakan tindakan kecurangan. Yang mampu melawan itu hanyalah kejujuran dari diri manusia itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *fraud* merupakan suatu tindakan penyimpangan/melanggar hukum atau perbuatan yang sengaja dilakukan baik oleh pihak dalam organisasi maupun pihak di luar organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dari pihak yang dirugikan, seperti organisasi atau pihak lain yang dirugikan.

2.2.2 Jenis-jenis *Fraud*

Menurut Karyono (2013) jenis-jenis *fraud* sebagai berikut :

“Kecurangan (*fraud*) terdiri atas empat kelompok, yaitu :

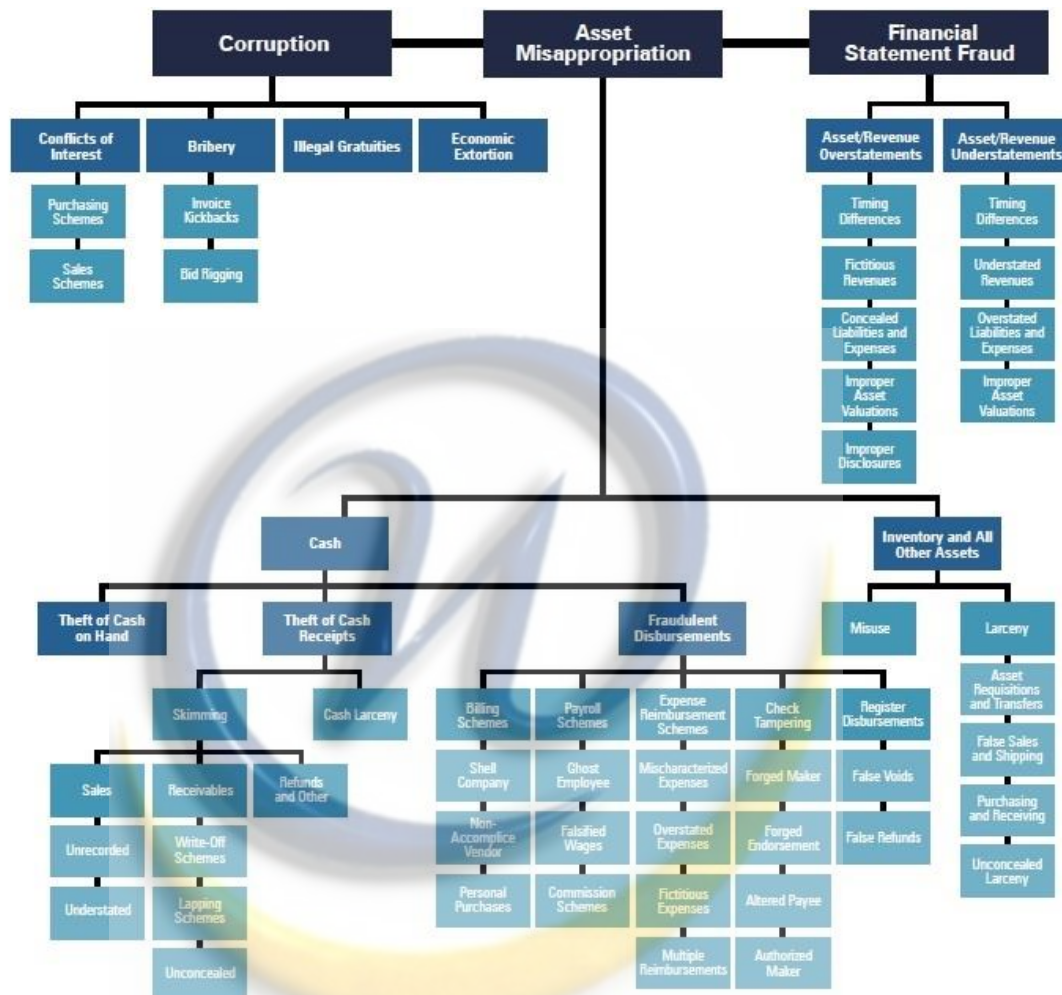
1. Kecurangan laporan (*fraud statement*), yang terdiri atas kecurangan laporan keuangan (*financial statement*) dan kecurangan laporan lain (*non financial statement*). Kecurangan laporan keuangan dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya dan lebih buruk dari sebenarnya.
2. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), yang terdiri atas kecurangan kas, dan kecurangan persediaan dan aset lain.
3. Korupsi (*corruption*) terdiri atas pertentangan kepentingan, penyuapan, hadiah tak sah, dan pemerasan ekonomi.
4. Kecurangan yang berkaitan dengan komputer, dapat berupa menambah, menghilangkan, atau mengubah masukan atau memasukan data palsu.”

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2014)

mengkategorikan kecurangan ke dalam tiga kelompok, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Kategori kecurangan ini lebih jelas lagi dapat dilihat pada Gambar 2.2 sebagai berikut :

Gambar 2.2

Kategori Kecurangan



Sumber: ACFE (2014)

Lebih rinci lagi ACFE (2014) seperti yang ditunjukkan Gambar 2.1 bahwa ketiga kategori kecurangan dibagi lagi menjadi beberapa subkategori, yaitu :

1. Kecurangan dalam Laporan Keuangan

- a. Pernyataan yang berlebihan atas aset dan pendapatan (*overstatements*)

- Perbedaan waktu,

- Pendapatan fiktif,
- Kewajiban dan beban disembunyikan,
- Penilaian aset yang tidak tepat,
- Pengungkapan yang tidak tepat.

b. Pernyataan yang dikurang-kurangkan atas aset dan pendapatan
(*understatements*)

- Perbedaan waktu,
- Pendapatan diperkecil,
- Kewajiban dan beban dilebih-lebihkan (*overstated*),
- Penilaian aset yang tidak tepat.

2. Penyalahgunaan Aset

a. Kas

- Pencurian kas
- Pencurian penerimaan kas

a) *Skimming*

- Penjualan (tidak tercatat dan dikurangi/diperkecil),
- Piutang (penghapusan skema, *lapping*, tidak disembunyikan),
- Pembayaran kembali dan lainnya

b) Pencurian kas

- Pencairan kecurangan

a) Skema penagihan (*shell company, non-accomplice vendor, personal purchase*),

- b) Skema penggajian (pegawai fiktif, upah yang dipalsukan, skema komisi),
 - c) Skema penggantian biaya (biaya yang disalahartikan, biaya yang dilebih-lebihkan, biaya fiktif, beberapa penggantian)
 - d) Pemeriksaan Sabotase (pembuat tiruan, dukungan/pengesahan tiruan, penerimaan uang yang diubah, pembuat kewenangan),
 - e) Pencatatan penggantian (void palsu dan pengembalian uang palsu).
- b. Persediaan dan aset lainnya
- Penyalahgunaan
 - Pencurian
 - a) Rekuisisi aset dan transfer,
 - b) Pembelian dan penjualan palsu,
 - c) Pembelian dan penerimaan,
 - d) Penyembunyian pencurian.

3. Korupsi

- Konflik kepentingan
 - a) Skema pembelian
 - b) Skema penjualan
- Penyipuan
 - a) Suap faktur

b) *Bid rigging*

- Gratifikasi ilegal
- Pemerasan ekonomi

2.2.3 Kondisi-kondisi Penyebab *Fraud*

Fraud tidak begitu saja terjadi dalam suatu organisasi, namun karena berbagai penyebab dan kemungkinan yang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan *fraud*. Menurut Priantara (2013) terdapat tiga kondisi yang mendorong terjadinya *fraud*, yaitu sebagai berikut :



Sumber: Priantara (2013)

Segitiga kecurangan (*Fraud Triangle*) menurut Priantara (2013) terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi, yaitu :

1. Insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud* (*Pressure*)

Tekanan dapat dibagi menjadi empat tipe, yaitu :

- a. Masalah keuangan,
- b. Terlibat perbuatan kejahatan atau tidak sesuai dengan norma,

- c. Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan,
 - d. Tekanan-tekanan lain.
2. Peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud* (*Opportunity*)
 - a. Sistem pengendalian internal yang lemah,
 - b. Tata kelola organisasi buruk.
 3. Dalih untuk membenarkan tindakan *fraud* (*Rationalization*)

Rationalization terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktivitasnya yang mengandung *fraud*. Para pelaku *fraud* meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu *fraud* tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi.

Sedangkan menurut Tuanakotta (2013) kondisi penyebab *fraud* ditunjukkan melalui *Fraud Triangle* sebagai berikut :

“Segitiga kecurangan (*Fraud Triangle*) terdiri dari tiga kondisi, yaitu :

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan (*pressure*) yang dirasakan pelaku kecurangan yang dipandang sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain (*perceived non-shareable financial need*). Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya tekanan :

 - a. Tingkat persaingan yang kuat atau kejenuhan pasar (*market situation*) yang diiringi dengan menurunnya *margin* keuntungan;
 - b. Kerawanan yang tinggi karena perubahan yang cepat, misalnya dalam teknologi, keusangan produk, atau tingkat bunga;
 - c. Permintaan (akan produk atau jasa yang dijual) merosot dan kegagalan usaha meningkat dalam industri itu atau perekonomian secara keseluruhan;
 - d. Kerugian operasional yang mengancam kebangkrutan, penyitaan aset yang dianggunkan ke bank, atau *hostile takeover* (pengambilalihan saham melalui penawaran untuk membeli saham dari pemegang saham yang bukan pengendali);

- e. Arus kas negatif atau ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari kegiatan usaha, meskipun entitas itu melaporkan laba dan pertumbuhan laba;
- f. Pertumbuhan besar-besaran atau tingkat keuntungan yang tidak biasa, khususnya dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama;
- g. Persyaratan dan ketentuan akuntansi, ketentuan perundang-undangan, atau aturan regulator yang baru.

Selain hal-hal di atas, manajemen mengalami tekanan yang kuat untuk memenuhi harapan pihak ketiga mengenai hal-hal berikut :

- a. Harapan tentang tingkat keuntungan atau tingkat kecenderungan (*trend level*) dari analisis penanaman (*investment analysts*), penanaman modal institusional (*institutional investors*), kreditur utama, atau pihak-pihak lain. Harapan ekspektasi ini bisa disebabkan oleh manajemen, misalnya *press release* atau pesan-pesan dalam laporan tahunan yang optimis;
- b. Kebutuhan akan pembelanjaan dengan tambahan utang atau modal agar bisa tetap kompetitif termasuk pembelanjaan riset dan pengembangan atau pembelian aset tetap (*capital expenditures*) besar-besaran;
- c. Kemampuan terbatas untuk memenuhi persyaratan pendaftaran di pasar modal (*exchange listing requirements*) atau membayar kembali utang atau ketentuan lain dalam akan kredit (*debt covenant*).

2. Peluang (*Perceived Opportunity*)

Peluang (*perceived opportunity*) adalah penting untuk melakukan kecurangan seperti yang dipersepsikan pelaku kecurangan. Sifat industri atau kegiatan entitas yang berpeluang melakukan pelaporan keuangan curang melalui :

- a. Transaksi dengan pihak terkait yang signifikan (*significant related-party transactions*) yang tidak merupakan bagian normal bisnis entitas yang bersangkutan, atau dengan entitas terkait yang tidak diaudit atau yang diaudit KAP lain;
- b. Posisi keuangan yang begitu kuat atau kemampuan mendominasi industri atau sektor tertentu yang memungkinkan entitas memaksakan syarat atau kondisi tertentu kepada pemasok (*suppliers*) atau pelanggan (*customers*). Ini mungkin indikasi tidak wajar atau antar pihak yang tidak setara (*inappropriate or non-arm's-length transactions*).

3. Pembeneran (*Rationalization*)

Pembeneran (*rationalization*) adalah pembeneran yang dibisikan untuk melawan hati nurani si pelaku kecurangan. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pembeneran :

- a. Komunikasi, implementasi, dukungan, atau penerapan nilai-nilai entitas atau standar etika oleh manajemen, yang tidak efektif;

- b. Anggota manajemen yang sebenarnya tidak berurusan dengan bidang keuangan, secara berlebihan ikut melibatkan diri memilih kebijakan akuntansi atau penentuan estimasi yang signifikan;
- c. Di masa lalu melanggar ketentuan perundangan, atau pernah ada tuntutan terhadap entitas, pimpinannya, atau TCWG (*those charged with governance*) dengan tuduhan melanggar ketentuan perundangan;
- d. Keinginan manajemen yang berlebihan untuk meningkatkan harga saham yang tinggi atau mempertahankan tren laba;
- e. Manajemen membuat komitmen kepada *analysts*, kreditur, dan pihak ketiga lainnya untuk mencapai ramalan (*forecasts*) yang sangat agresif atau tidak realistis;
- f. Manajemen gagal atau tidak memperbaiki kelemahan signifikan yang diketahuinya mengenai pengendalian internal dengan cepat;
- g. Adanya kepentingan manajemen untuk menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk menekan angka laba bagi kepentingan perpajakan;
- h. Suasana kerja yang tidak kondusif (*low morale*) di antara pimpinan perusahaan;
- i. Pemilik yang sekaligus pengelola perusahaan (*owner-manager*) tidak membedakan apa itu transaksi pribadi atau bisnis;
- j. Sengketa di antara pemegang saham dalam perusahaan tertutup;
- k. Upaya berulang-ulang oleh manajemen untuk membenarkan penggunaan akuntansi yang tidak tepat dengan alasan masalahnya tidak material.”

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa kondisi-kondisi penyebab kecurangan yaitu adanya tekanan yang tidak semestinya dilakukan dan didukung oleh kesempatan untuk melakukan kecurangan dengan tidak adanya sikap yang jujur dan merugikan pihak lain, serta keterlibatan pelaku kecurangan yang mungkin berada dalam tekanan yang cukup besar sehingga menyebabkan pelaku membenarkan tindakan yang tidak jujur tersebut.

2.2.4 Definisi Pencegahan Kecurangan

Kasus *fraud* yang semakin marak terjadi membuat kerugian yang cukup besar bagi organisasi itu sendiri maupun bagi negara. Apabila *fraud* tidak dapat dicegah, maka akan berakibat fatal bagi organisasi dan negara. Untuk itu,

manajemen harus mengambil tindakan yang tepat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2008) menjelaskan bahwa pencegahan *fraud* adalah sebagai berikut :

“Pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*), yaitu memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, menurunkan tekanan pada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya, serta mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan. Pencegahan kecurangan yang efektif memiliki lima tujuan, yaitu :

1. *Prevention*, yaitu mencegah terjadinya kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
2. *Deterrence*, yaitu menangkal pelaku potensial bahkan tindakan untuk yang bersifat coba-coba;
3. *Disruption*, yaitu mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan sejauh mungkin;
4. *Identification*, yaitu mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian;
5. *Civil action prosecution*, yaitu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan kecurangan kepada pelakunya.”

Sedangkan *The Institute of Internal Auditors* (IIA) (2009) menjelaskan pencegahan *fraud* adalah sebagai berikut :

“Fraud prevention involves those actions taken to discourage the commission of fraud and limit fraud exposure when it occurs. Instilling a strong ethical culture and setting the correct tone at the top are essential elements in preventing fraud. A strong principal mechanism for preventing fraud is effective and efficient internal controls, including controls related to screening customers, vendors, and external business relationship partners. An organization with effective internal controls deters fraudsters from the temptation to commit fraud. Management is primarily responsible for establishing and maintaining internal controls in an organization.”

Berdasarkan penjelasan IIA (2009) tersebut bahwa pencegahan *fraud* melibatkan tindakan-tindakan yang diambil untuk mencegah pelaksanaan kecurangan dan membatasi eksposur kecurangan ketika itu terjadi. Menanamkan

budaya etis yang kuat dan letak *tone at the top* yang benar merupakan elemen penting dalam mencegah kecurangan. Mekanisme utama yang kuat untuk mencegah kecurangan adalah pengendalian internal yang efektif dan efisien, termasuk pengendalian internal yang berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan rekan bisnis eksternal. Organisasi dengan pengendalian internal yang efektif menghalangi orang yang bertindak curang dari godaan untuk melakukan kecurangan. Manajemen terutama bertanggung jawab untuk membangun dan mempertahankan pengendalian internal dalam suatu organisasi.

Mencegah *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terhadap terjadinya *fraud*. Pencegahan *fraud* dengan menjabarkan sarana kendali. Sarana kendali dimaksud adalah dengan menciptakan kebijakan, prosedur, organisasi, teknik pengendalian, dan peran serta pegawai (Karyono, 2013).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pencegahan *fraud* merupakan tindakan untuk menekan faktor penyebab *fraud* dengan mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan. Mekanisme utama yang kuat untuk mencegah kecurangan adalah pengendalian internal yang efektif dan efisien dalam organisasi.

2.2.5 Kriteria Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengacu pada kriteria pencegahan *fraud*. Kriteria pencegahan *fraud* tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Tunggal (2013) yaitu terdiri dari :

1. Syarat penemuan *fraud*,
2. Ruang lingkup *fraud auditing*,
3. Pendekatan audit.

2.2.5.1 Syarat Penemuan *Fraud*

Menurut Tunggal (2013) bahwa syarat penemuan *fraud* terdiri dari :

1. Penemuan *Fraud*

Audit internal diharapkan dapat menemukan kelemahan atau *fraud* yang terjadi di dalam perusahaan, sehingga segala aktivitas yang bertentangan dengan prosedur atau kebijakan perusahaan dapat dicegah dan diatasi sehubungan dengan itu.

Penemuan *fraud*, dapat diketahui dari sistem pengawasan yang diterapkan (misalnya melalui audit internal), kebetulan (*by accident*), dan laporan pihak lain.

2. Bukti yang Cukup Kompeten

Bukti yang cukup merupakan bukti yang faktual dan meyakinkan, sehingga orang yang diberi bukti akan mempunyai kesimpulan yang sama dengan auditor. Sehingga bukti yang kompeten adalah bukti yang dapat dipercaya dan cara terbaik untuk memperolehnya adalah dengan mempergunakan teknik audit yang tepat.

Dapat dikatakan bahwa syarat penemuan *fraud* adalah dapat menemukan kelemahan atau *fraud* yang terjadi dalam organisasi (baik dari sistem pengawasan yang diterapkan, secara kebetulan, maupun laporan dari pihak lain), sehingga dapat dicegah dan segera diatasi. Menemukan kelemahan atau *fraud* tersebut

harus disertai dengan bukti yang cukup kompeten sebagai bukti yang faktual dan meyakinkan.

2.2.5.2 Ruang Lingkup *Fraud Auditing*

Menurut Tunggal (2013) ruang lingkup *fraud auditing* meliputi :

1. Tingkat Materialitas

Dimana suatu *fraud* tetap dianggap material secara kualitatif dan tidak menjadi masalah terhadap beberapa jumlah uang yang tersangkut.

Maksud dari definisi ini adalah :

- a. Eksistensi *fraud* sendiri menunjukkan adanya suatu kelemahan dalam pengendalian.
- b. *Fraud* menurut sifatnya dapat berkembang apabila tidak di cegah. *Fraud* secara tidak langsung menyatakan masalah integritas mempunyai konsekuensi yang jauh dari jangkauan. Misalnya, manajemen melakukan pembayaran ilegal, perusahaan dan eksklusif yang terlibat akan menghadapi konsekuensi hukum dan sangat merugikan publisitas perusahaan.

2. Biaya

Untuk biaya manajemen harus menganalisis keadaan biaya secara keseluruhan atas manfaat dari perluasan audit dan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk mencegah *fraud* pada masa yang akan datang. Karena pada dasarnya untuk menguji setiap transaksi dibutuhkan biaya yang sangat besar.

3. Informasi yang Sensitif

Apabila telah terdeteksi adanya *fraud*, auditor segera membuat kebijakan untuk menghalangi dan mendeteksi aktivitas *fraud*. Sifat sensitif dari aktivitas *fraud* atau dicurigai adanya aktivitas demikian membutuhkan suatu petunjuk formal dalam pelaporan dan praktek penyelidikannya.

4. Pengembangan Integritas

Auditor internal sering diminta untuk melakukan program peningkatan integritas, dimana prioritas manajemen ditinjau bersama seluruh karyawan.

Selain itu, keinginan untuk menghindari perbedaan pendapat, keinginan untuk menghindari pengambil alih manajemen adalah topik yang mungkin perlu ditekankan pada program peningkatan integritas.

Dapat dikatakan bahwa ruang lingkup *fraud auditing* meliputi tingkat materialitas, yaitu *fraud* dianggap material secara kualitatif tanpa melihat jumlah uang yang tersangkut dalam tindakan *fraud* tersebut karena adanya *fraud* membuktikan bahwa terdapat kelemahan dalam pengendalian dan *fraud* dapat berkembang apabila tidak dicegah serta dapat merusak integritas suatu organisasi. Sehingga manajemen perlu menganalisis biaya yang dikeluarkan atas manfaat perluasan audit dan tindakan-tindakan dalam mencegah *fraud* karena kegiatan ini akan membutuhkan biaya yang besar. Apabila *fraud* ditemukan, ini merupakan informasi yang sensitif sehingga dibutuhkan petunjuk formal dalam pelaporan dan penyelidikannya. Selain itu, diadakannya program peninjauan dan peningkatan

integritas bagi manajemen bersama seluruh stafnya, sehingga dapat mempersempit celah *fraud* di setiap tingkatan dalam organisasi.

2.2.5.3 Pendekatan Audit

Pendekatan audit menurut Tunggal (2013) terdiri dari :

1. Analisis Ancaman

Analisis ancaman seperti analisis pengungkapan *fraud* harus dilakukan. Analisis ancaman dapat mengarahkan rencana audit, misalnya melakukan pengawasan pada aset untuk mengetahui terjadinya *fraud*.

2. Survei Pendahuluan

Audit internal dalam perusahaan melakukan survei pendahuluan dasar untuk memformulasikan audit program.

3. Audit Program

Audit internal diharuskan menyusun dan mendokumentasikan program kerja dalam rangka mencapai sasaran penugasan.

4. Pemilihan Tim Audit

Tugas dari tim audit ini yaitu harus mengumpulkan informasi mengenai catatan-catatan yang tidak lengkap, ketidakcukupan bukti-bukti, kesalahan penyajian, atau mengubah bukti secara sengaja dalam melaksanakan kecurangan audit.

Dapat dikatakan bahwa pendekatan audit meliputi analisis ancaman seperti pengungkapan *fraud* yang perlu dilakukan sehingga dapat mengarahkan rencana audit, melaksanakan survei pendahuluan sebagai dasar dalam menyusun program

audit, lalu hasilnya disusun serta didokumentasikan sebagai audit program yang akan dilaksanakan, terakhir pemilihan tim audit yang bertugas mengumpulkan informasi mengenai bukti tindakan kecurangan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1.	Oguda Ndege Joseph, Odhiambo Albert, dan Prof John Byaruhanga	2015	<i>Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega Country</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sistem pengendalian internal dan pendeteksian serta pencegahan <i>fraud</i> di bendahara sub daerah Kakamega.
2.	A. N. Vijayakumar dan Dr. N. Nagaraja	2012	<i>Internal Control System : Effectiveness of Internal Audit in Risk Management at Public Sector Enterprises</i>	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem yang kuat dari audit internal, baik dalam desain maupun kepatuhannya, adalah baik untuk organisasi tersebut dalam mengelola risiko melalui pencegahan dan pendeteksian dini dari <i>error</i> dan <i>fraud</i> . Sistem audit internal yang efektif membantu organisasi dalam kinerja dan profitabilitasnya serta mencegahnya dari kerugian. Selain itu untuk memastikan pelaporan keuangan yang handal dan kepatuhan terhadap dan peraturan, menghindari rusaknya reputasi organisasi dan konsekuensi lainnya. Pada akhirnya, menetapkan jalan untuk memudahkan organisasi mencapai tujuan yang diinginkan.

3.	Ishola Saheed Ademola, Abikoye Olubukunola Adedoyin, dan Olajide Raji Alade	2015	<i>Effect of Internal Control System in Nigeria Public Sectors: A Case Study of Nigeria National Petroleum Corporation</i>	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembentukan pengendalian internal memainkan peranan penting dalam mencegah <i>fraud</i> . Pengendalian internal juga merupakan dasar bagi keputusan bahwa manajemen dan pihak berwenang yang terkait harus fokus pada cara-cara yang lebih strategis dari pengendalian internal sebagai cara untuk mencegah <i>fraud</i> di sektor publik. Lebih dari itu, meskipun terdapat pengendalian internal yang tidak efisien, seperti reformasi sektor publik dll, pengendalian internal yang efektif yang paling tepat/efektif dalam mencegah <i>fraud</i> . Jelas bahwa tindakan <i>fraud</i> telah menjadi bagian dari sektor publik karena budaya manajemen yang tidak efisien pada <i>fraud</i> , tidak adanya sistem pengendalian internal, dll.
4.	Mahdi Solehi, Mahmud Mousavi Shiri, dan Fatemeh Ehsanpour	2013	<i>Effectiveness of Internal Control in the Banking Sector: Evidence from Bank Mellat, Iran</i>	Hasil penelitian menyatakan bahwa kelemahan lingkungan pengendalian sebagai komponen sistem pengendalian internal dalam insiden <i>error</i> dan <i>fraud</i> adalah efektif. Oleh karena itu, lebih meningkatkan kelemahan lingkungan pengendalian di Bank Mellat, maka lebih banyak insiden <i>error</i> dan <i>fraud</i> . Lebih lanjut, kelemahan penilaian risiko sebagai komponen sistem pengendalian internal dalam insiden <i>error</i> dan <i>fraud</i> adalah efektif. Oleh karena itu, lebih meningkatkan kelemahan penilaian risiko di Bank Mellat, maka lebih banyak insiden <i>error</i> dan <i>fraud</i> . Lebih lanjut lagi, kelemahan aktivitas pengendalian sebagai komponen sistem pengendalian internal dalam insiden <i>error</i> dan <i>fraud</i> adalah efektif. Oleh karena itu, lebih meningkatkan kelemahan aktivitas pengendalian di Bank Mellat, maka lebih banyak insiden <i>error</i> dan <i>fraud</i> . Kelemahan informasi dan komunikasi sebagai komponen sistem pengendalian internal dalam insiden <i>error</i> dan <i>fraud</i>

				adalah efektif. Oleh karena itu, lebih meningkatkan kelemahan informasi dan komunikasi di Bank Mellat, maka lebih banyak insiden <i>error</i> dan <i>fraud</i> . Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal di Bank Mellat adalah baik dalam mencegah insiden <i>error</i> dan <i>fraud</i> .
5.	Dominic Peltier-Rivest dan Nicole Lanoue	2015	<i>Cutting Fraud Losses in Canadian Organizations</i>	Penelitian ini membandingkan bahwa efektivitas berbagai pengendalian internal telah mengurangi kerugian kecurangan. Hasilnya akan membantu organisasi memprioritaskan keputusan investasi mengenai pengelolaan risiko kecurangan, mengingat sumber finansial yang langka. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hotline dan pemeriksaan mendadak secara signifikan mengurangi kerugian kecurangan kerja sebagai bagian dari program pengendalian pencegahan kecurangan. Pelatihan etika biasa bagi pegawai dan manajer serta audit internal, keduanya dapat mengurangi kerugian kecurangan ketika dilakukan secara independen, tetapi nampaknya tidak memiliki dampak yang statistik ketika digunakan bersamaan dengan hotline dan pemeriksaan mendadak. Hotline dan pemeriksaan mendadak adalah pengendalian yang lebih efisien, terkait dengan pengurangan 54 dan 69 persen pada rata-rata kerugian kecurangan, berturut-turut.
6.	Kristy Holtfreter	2004	<i>Fraud in Us Organisation s: An Examination of Control Mechanisms</i>	Hasil penelitian menemukan bahwa biaya langsung atas kecurangan kerja adalah luas. Lebih dari itu, terkait hasil sosial, seperti berkurangnya kepercayaan di lembaga pemerintah dan perusahaan, mengurangi kepercayaan pelanggan, dan kenaikan harga produk komersial juga dapat diatasi, tetapi tidak mungkin untuk diukur secara akurat. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa, di Amerika

				<p>Serikat, hampir tidak ada pengaturan organisasi yang bebas terhadap kecurangan dari dalam. Organisasi harus mengambil langkah yang diperlukan untuk pendeteksian dan pencegahan kecurangan dari awal. Peneliti harus fokus pada berbagai konteks kecurangan dalam organisasi, yang akan membutuhkan kerja sama dengan praktisi. Upaya tersebut tidak diragukan lagi akan memberikan kontribusi untuk pengembangan lebih lanjut dari teori kejahatan kerah putih serta pendekatan yang strategis untuk mencegah kecurangan. Penelitian ini menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan dan mengurangi kecurangan memerlukan strategi yang beragam sesuai dengan pengaturan organisasi. Pemberian pendekatan sistem hukum yang tidak konsisten untuk pelaku kejahatan kerah putih, sikap tegas organisasi terhadap kecurangan kerja adalah sangat penting. Meskipun berbagai mekanisme pengendalian mungkin tersedia untuk organisasi, penelitian ini menemukan bahwa akses pribadi saja tidak bisa mengekang kerugian dolar. Mekanisme pengendalian tidak menjamin pertahanan organisasi jika ditolak atau diabaikan, situasi tersebut dalam literatur sebagai faktor “tidak terkendali”. Untuk memberantas kecurangan, penerapan strategi pengendalian tetap merupakan langkah yang nyata, tetapi secara konsisten lebih penting mengikuti praktik dan melaksanakan kebijakan organisasi.</p>
7.	Enofe, A. O. (DBA), Egbe, Michael Egbe, dan America, Duke	2016	<i>Internal Control Mechanism and Fraud Prevention in The Nigerian Public</i>	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kemampuan pegawai dan integritas staf menunjukkan hubungan yang signifikan dengan pencegahan kecurangan walaupun kekuatan dari hubungan tersebut berbeda. Namun, tata kelola perusahaan dan pemisahan tugas tidak</p>

	Okporua		<i>Sector: An Application of The New Fraud Diamond Theory</i>	menunjukkan pengaruh signifikan dalam pencegahan kecurangan. Baru-baru ini, kecurangan pada sektor publik di Nigeria menjadi suatu fenomena, yang membutuhkan resolusi drastis untuk melumpuhkan ekonomi. Praktik kecurangan memberikan dampak terhadap perekonomian; semua pihak harus di geladak demi memastikan bahwa celah dalam sistem pengendalian internal dimaksimalkan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif akan lebih jauh lagi dalam memastikan bahwa kecurangan tidak hanya dicegah tetapi juga dideteksi sejak tahap awal. Namun, ini belum terjadi karena telah ada sejumlah praktik korupsi pada sektor publik di Nigeria dalam beberapa kali. Hal ini menunjukkan bahwa teori kecurangan belum diterapkan secara memadai dalam mencegah kecurangan.
8.	John W. Wakiriba dan Francis K. Kirogo	2013	<i>Effect of Internal Auditing on Performance of Sub Country Treasuries: A Case Study of Mirangine Sub Country Treasury, Nyandarua-Country</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan bagian dari manajemen pengendalian internal di Bendahara Sub Negara. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal membantu menilai risiko yang disajikan dalam laporan keuangan khususnya yang memungkinkan menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak andal. Sistem pengendalian internal juga mempengaruhi kinerja organisasi karena terdapat kedisiplinan dan struktur yang termasuk integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi dari organisasi dan stafnya.
9.	Samuel Ngigi Nyakarimi & Mary Karwirwa	2015	<i>Internal Control System as Means of Fraud Control in</i>	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang dibentuk oleh berbagai lembaga keuangan mampu mengendalikan kecurangan. Jadi, terdapat hubungan yang signifikan antara sistem

			<i>Deposit Taking Financial Instructions in Imenti North Sub-Country</i>	pengendalian internal (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, dan pemantauan) dengan pengendalian kecurangan di lembaga keuangan pada Sub Negara Imenti Utara.
10.	Jaya Kumar Shanmugam, Mohd Hassam Che Haat & Azwadi Ali	2012	<i>An Explanatory Study of Internal Control and Fraud Prevention Measures in SMEs</i>	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal dan langkah-langkah pencegahan kecurangan memainkan peranan penting dan memiliki pengaruh pada kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
11.	Rusman Soleman	2013	Pengaruh Pengendalian Internal dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: 1) Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap <i>Good Corporate Governance</i> . Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola Pemerintahan yang baik dilakukan dengan menetapkan sistem pengendalian internal dalam setiap aktivitas organisasi dan dapat berjalan dengan efektif jika struktur pengendalian dirancang untuk diterapkan secara baik dalam lingkungan organisasi, 2) <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan <i>fraud</i> dapat dilakukan dengan mengeliminasi faktor-faktor pendorong terjadinya kecurangan dengan menetapkan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> yaitu transparansi, akuntabilitas, kewajaran, integritas dan partisipasi, dan 3) Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Hal ini menunjukkan pencegahan <i>fraud</i> dilakukan melalui pengendalian internal dengan cara mengurangi tekanan, kesempatan, dan perbaikan moral individu pada setiap level dalam

				organisasi.
12.	Chairun Nisak, Prasetyono, dan Fitri Ahmad Kurniawan	2013	Sistem Pengendalian Intern Dalam Pencegahan <i>Fraud</i> Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Kabupaten Bangkalan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> baik secara simultan maupun secara parsial.
13.	Ni Luh Putu Purnama Sari, Gede Adi Yuniarta, dan I Made Pradana Adiputra	2015	Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi <i>Good Governance</i> Terhadap Kecenderungan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>fraud</i> pada SKPD di Kabupaten Tabanan, 2) Ketaatan aturan akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>fraud</i> pada SKPD di Kabupaten Tabanan, 3) Persepsi kesesuaian kompensasi secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>fraud</i> pada SKPD di Kabupaten Tabanan, 4) Implementasi <i>Good Governance</i> secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>fraud</i> pada SKPD di Kabupaten Tabanan, 5) Secara simultan dapat diketahui bahwa Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> pada SKPD di Kabupaten Tabanan. Hal ini berarti untuk meminimalisasi <i>fraud</i> (kecurangan) maka perlu ditingkatkan efektivitas sistem pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, persepsi kesesuaian kompensasi dan implementasi <i>good governance</i> .
14.	Taufeni Taufik	2011	Pengaruh Peran Inspektorat Daerah	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya keterkaitan antara peran Inspektorat Daerah dengan Pencegahan Kecurangan yang sangat kuat. Semakin

			Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Riau)	baik peran Inspektorat Daerah maka akan semakin tinggi pencegahan kecurangan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Peran Inspektorat Daerah terhadap Pencegahan Kecurangan.
15.	Nurhasanah	2016	Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal, Karakteristik Instansi dan Kasus Korupsi (Studi Empiris di Kementerian/Lembaga)	Hasil penelitian mengatakan bahwa: 1) Pengendalian internal yang efektif dapat menurunkan korupsi. Sehingga disarankan kementerian/lembaga menerapkan pengendalian internal yang efektif agar dapat menurunkan jumlah kasus korupsi, 2) Tingkat kewenangan audit internal setingkat Eselon I dapat berpengaruh menurunkan kasus korupsi di kementerian/lembaga di Indonesia, sehingga wacana KPK untuk merubah struktur organisasi audit internal menjadi seluruhnya Eselon I adalah tepat, 3) Semakin besar ukuran kementerian/lembaga berpengaruh terhadap meningkatnya kasus korupsi di Indonesia. Maka disarankan agar memperkecil anggaran kementerian/lembaga sehingga mengurangi jumlah kasus korupsi.

2.4 Kerangka Pemikiran

Pengendalian internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh seluruh tingkatan dalam organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi pencapaian tujuan organisasi terkait dengan pelaporan keuangan yang andal, efektivitas dan efisiensi aktivitas operasi, serta kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan organisasi tersebut dapat tercapai apabila seluruh tingkatan dalam organisasi dapat memenuhi dan melaksanakan kelima komponen pengendalian internal dengan baik.

Komponen pengendalian internal menurut COSO (2013) terdiri dari :

1. Lingkungan pengendalian, yang merupakan seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal diseluruh organisasi. Lingkungan pengendalian terdiri dari :
 - a. Organisasi menunjukkan komitmen dalam integritas dan nilai-nilai etika,
 - b. Menjalankan tanggung jawab pengawasan,
 - c. Menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab,
 - d. Menunjukkan kemampuan dalam berkomitmen/bertanggung jawab,
 - e. Akuntabilitas.
2. Penilaian Risiko, risiko merupakan kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan dapat berpengaruh negatif dalam pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko meliputi proses yang dinamis dan berulang dalam mengidentifikasi dan menilai risiko untuk pencapaian tujuan. Penilaian risiko terdiri dari :
 - a. Menentukan tujuan yang sesuai,
 - b. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko,
 - c. Menilai risiko kecurangan,
 - d. Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan yang signifikan.
3. Aktivitas Pengendalian, yaitu tindakan yang dibentuk melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arah manajemen

dalam mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian terdiri dari :

- a. Memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian,
 - b. Memilih dan mengembangkan pengendalian umum atas teknologi,
 - c. Menyebarkan melalui kebijakan dan prosedur.
4. Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
- a. Menggunakan informasi yang relevan,
 - b. Berkomunikasi secara internal,
 - c. Berkomunikasi secara eksternal.
5. Aktivitas Pemantauan, yaitu evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau beberapa kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal, termasuk pengendalian untuk mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, tersedia dan berfungsi. Aktivitas pemantauan terdiri dari :
- a. Melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah,
 - b. Mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan.

Komponen-komponen pengendalian internal saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, pengendalian internal bukanlah suatu proses yang berurutan, tetapi merupakan suatu interaksi antar tujuan-tujuan dimana komponen-komponen pengendalian internal ini akan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

Dengan diterapkannya pengendalian internal dalam suatu organisasi, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai dan layak. Namun, bukan keyakinan absolut. Baiknya suatu pengendalian internal tidak menjamin sepenuhnya bahwa apa yang menjadi tujuan dari organisasi akan tercapai. Hal ini disebabkan karena pengendalian internal memiliki keterbatasan-keterbatasan.

Faktor manusia adalah yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan sistem pengendalian internal. Sebuah sistem pengendalian yang baik akan dapat menjadi tidak efektif oleh karena adanya karyawan yang kelelahan, ceroboh, atau bersikap acuh tak acuh. Demikian juga halnya dengan kolusi, di mana kolusi ini akan dapat secara signifikan mengurangi keefektifan sebuah sistem dan mengeliminasi proteksi yang ditawarkan dari pemisahan tugas. Belum lagi adanya sebuah pandangan umum yang mengatakan bahwa pada prinsipnya di dunia ini tidak ada sesuatu yang begitu sempurna, termasuk sistem pengendalian internal yang dijalankan perusahaan. Terakhir, ukuran perusahaan juga akan dapat memicu keterbatasan pengendalian internal (Hery, 2013).

Pengendalian sangat ditentukan oleh efektivitas seluruh tingkatan dalam organisasi dan bukan suatu upaya yang harus dimulai dari lini terbawah, sehingga masing-masing jajaran internal organisasi menyadari akan peranan masing-masing jabatan/fungsi/tugas dalam organisasi tersebut. Apabila peranan masing-masing jabatan/fungsi/tugas tersebut telah dilaksanakan dengan memadai diharapkan dapat tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan.

Keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi serta ketaatan pada hukum dan peraturan bisa dicapai oleh organisasi manakala

manajemen mampu menerapkan prosedur pengendalian internal yang baik sehingga mampu mencegah terjadinya kecurangan yang berdampak pada ketidakandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi dan ketaatan pada hukum dan peraturan (Soleman, 2013).

Fraud diartikan sebagai suatu tindakan penyimpangan/melanggar hukum atau perbuatan yang sengaja dilakukan baik oleh pihak dalam organisasi maupun pihak di luar organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dari pihak yang dirugikan, seperti organisasi atau pihak lain yang dirugikan.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2014) mengategorikan kecurangan ke dalam tiga kelompok, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi.

Fraud ini dapat disebabkan oleh beberapa kondisi, yaitu adanya tekanan yang tidak semestinya dilakukan dan didukung oleh kesempatan untuk melakukan kecurangan dengan tidak adanya sikap yang jujur dan merugikan pihak lain, serta keterlibatan pelaku kecurangan yang mungkin berada dalam tekanan yang cukup besar sehingga menyebabkan pelaku membenarkan tindakan yang tidak jujur tersebut.

Kasus *fraud* yang semakin marak terjadi membuat kerugian yang cukup besar bagi organisasi itu sendiri maupun bagi negara. Apabila *fraud* tidak dapat dicegah, maka akan berakibat fatal bagi organisasi dan negara. Untuk itu, manajemen harus mengambil tindakan yang tepat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*.

Pencegahan *fraud* merupakan tindakan untuk menekan faktor penyebab *fraud* dengan mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan. Mekanisme utama yang kuat untuk mencegah kecurangan adalah pengendalian internal yang efektif dan efisien dalam organisasi. Pencegahan *fraud* menurut Tunggal (2013) dapat dilakukan dengan :

1. Syarat penemuan *fraud*, yaitu dapat menemukan kelemahan atau *fraud* yang terjadi dalam organisasi (baik dari sistem pengawasan yang diterapkan, secara kebetulan, maupun laporan dari pihak lain), sehingga dapat dicegah dan segera diatasi. Menemukan kelemahan atau *fraud* tersebut harus disertai dengan bukti yang cukup kompeten sebagai bukti yang faktual dan meyakinkan.
2. Ruang lingkup *fraud auditing*, yang meliputi tingkat materialitas, yaitu *fraud* dianggap material secara kualitatif tanpa melihat jumlah uang yang tersangkut dalam tindakan *fraud* tersebut karena adanya *fraud* membuktikan bahwa terdapat kelemahan dalam pengendalian dan *fraud* dapat berkembang apabila tidak dicegah serta dapat merusak integritas suatu organisasi. Sehingga manajemen perlu menganalisis biaya yang dikeluarkan atas manfaat perluasan audit dan tindakan-tindakan dalam mencegah *fraud* karena kegiatan ini akan membutuhkan biaya yang besar. Apabila *fraud* ditemukan, ini merupakan informasi yang sensitif sehingga dibutuhkan petunjuk formal dalam pelaporan dan penyelidikannya. Selain itu, diadakannya program peninjauan dan peningkatan integritas bagi manajemen

bersama seluruh stafnya, sehingga dapat mempersempit celah *fraud* di setiap tingkatan dalam organisasi.

3. Pendekatan audit, yang meliputi analisis ancaman seperti pengungkapan *fraud* yang perlu dilakukan sehingga dapat mengarahkan rencana audit, melaksanakan survei pendahuluan sebagai dasar dalam menyusun program audit, lalu hasilnya disusun serta didokumentasikan sebagai audit program yang akan dilaksanakan, terakhir pemilihan tim audit yang bertugas mengumpulkan informasi mengenai bukti tindakan kecurangan.

Dengan dilaksanakannya pengendalian internal secara memadai dalam suatu organisasi diharapkan dapat mencegah kecurangan yang akan merugikan organisasi tersebut sebagaimana hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ademola *et al.* (2015) bahwa pembentukan pengendalian internal memainkan peranan penting dalam mencegah kecurangan. Pengendalian internal juga merupakan dasar bagi keputusan bahwa manajemen dan pihak berwenang yang terkait harus fokus pada cara-cara yang lebih strategis dari pengendalian internal sebagai cara untuk mencegah kecurangan. Selain itu, hasil yang sama ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rivest & Lanoue (2015) bahwa efektivitas berbagai pengendalian internal telah mengurangi kerugian kecurangan.

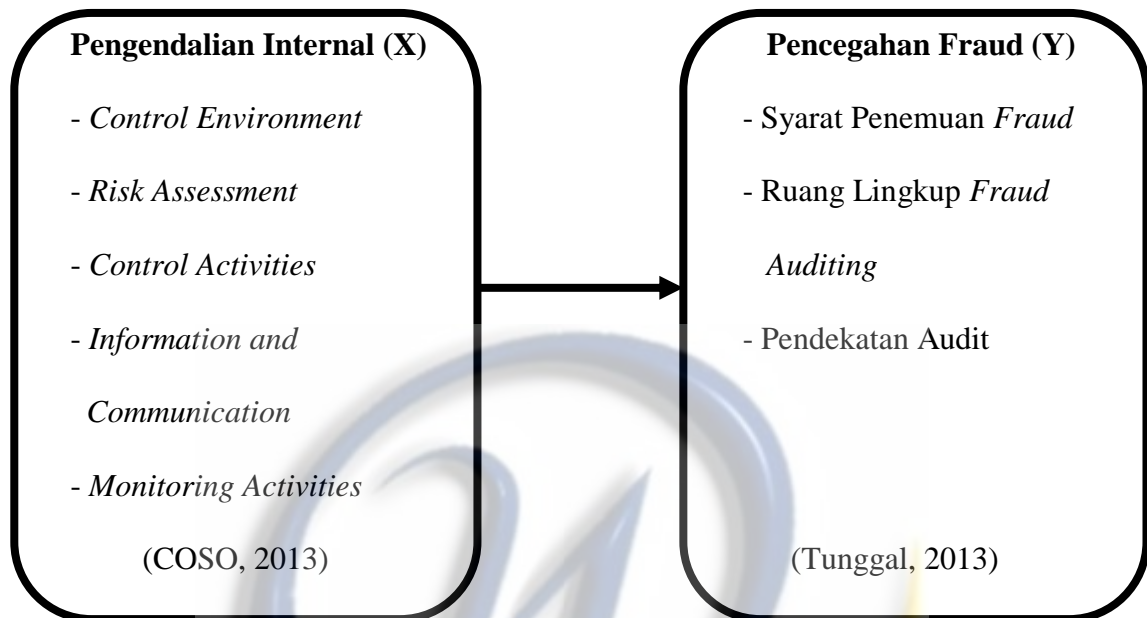
Hasil penelitian Soleman (2013) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu hasil yang berkaitan juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan Joseph *et al.* (2015) bahwa

terdapat hubungan yang signifikan antara sistem pengendalian internal dan pendeteksian dan pencegahan *fraud*.

Mendukung temuan di atas, hasil penelitian Nurhasanah (2016) menemukan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat menurunkan korupsi. Sehingga disarankan kementerian/lembaga menerapkan pengendalian internal yang efektif agar dapat menurunkan jumlah kasus korupsi. Sejalan dengan temuan ini, Vijayakumar & Nagaraja (2012) menjelaskan bahwa sistem yang kuat dari pengawasan internal, baik dalam desain maupun kepatuhannya adalah baik bagi organisasi tersebut dalam mengelola risiko melalui pencegahan dan pendeteksian dini dari *error* dan *fraud*. Untuk itu, Enofe *et al.* (2016) menjelaskan bahwa pengendalian internal yang efektif diharapkan akan lebih jauh lagi dalam memastikan bahwa kecurangan tidak hanya dicegah tetapi juga dideteksi sejak dini.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menggambarkannya dalam suatu model kerangka pemikiran sebagai bentuk alur pemikiran dalam penelitian ini. Model kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.4
Model Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis Penelitian

Atas dasar kerangka pemikiran yang sudah peneliti kemukakan, maka peneliti merumuskan hipotesis, yaitu sebagai berikut :

“Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*”